

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sektor peternakan sapi perah memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan susu sebagai sumber protein hewani. Susu merupakan salah satu komoditas penting yang permintaannya terus meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan kesadaran masyarakat terhadap gizi. Namun demikian, produksi susu sapi perah dalam negeri hingga saat ini masih belum mampu memenuhi kebutuhan nasional secara optimal, sehingga Indonesia masih bergantung pada impor susu. Kondisi ini menunjukkan perlunya upaya peningkatan produksi susu dalam negeri, salah satunya melalui peningkatan kapasitas peternak sapi perah (Rusdiana & Sejati, 2017).

Rendahnya produksi susu dalam negeri tidak hanya disebabkan oleh faktor eksternal seperti keterbatasan lahan dan sarana pendukung, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor internal, terutama rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) peternak. Menurut Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, permasalahan utama peternakan rakyat meliputi rendahnya kapasitas peternak, keterbatasan akses terhadap teknologi peternakan modern, serta lemahnya manajemen pakan dan kesehatan ternak. Sebagian besar peternak sapi perah masih mengelola usahanya secara tradisional dan dalam skala kecil, serta memiliki keterbatasan dalam mengikuti pelatihan teknis dan memanfaatkan teknologi modern. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas peternak melalui pendampingan dan pelatihan yang berkelanjutan menjadi hal yang sangat penting bagi keberlanjutan usaha peternakan sapi perah (Rohman & Azizah, 2019).

Jawa Timur merupakan salah satu provinsi penghasil susu terbesar di Indonesia karena memiliki kondisi geografis dan iklim yang mendukung pengembangan peternakan sapi perah (Harmunisa & Subiyantoro, 2022). Salah satu daerah di Jawa Timur yang memiliki potensi pengembangan

peternakan sapi perah adalah Kabupaten Magetan, yang terletak di bagian barat provinsi dan berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Magetan mengembangkan potensi tersebut melalui Program Kampung Susu Lawu (KSL), yaitu program pemberdayaan peternak sapi perah berbasis komunitas.

Kampung Susu Lawu terletak di Dusun Singolangu, Kelurahan Sarangan, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan, yang berada di lereng Gunung Lawu dengan ketinggian sekitar  $\pm 1.300$  meter di atas permukaan laut. Kondisi geografis ini memiliki suhu udara yang sejuk dan lingkungan yang mendukung budidaya sapi perah. Selain itu, wilayah Dusun Singolangu memiliki kontur perbukitan dan lahan pertanian yang memungkinkan ketersediaan pakan hijau secara berkelanjutan. Dengan kondisi tersebut, Kampung Susu Lawu berkembang sebagai sentra peternakan sapi perah rakyat dengan jumlah ratusan ekor sapi dan produksi susu sekitar 2.000 liter per hari. (Harmunisa & Subiyantoro, 2022)

Perkembangan Kampung Susu Lawu tidak terlepas dari peran pelopor lokal, yaitu Sri Wahyuni atau yang dikenal sebagai “Bu Wo”. Sejak memulai usaha peternakan sapi perah pada tahun 2007 dengan jumlah ternak yang masih sangat terbatas, Bu Wo secara mandiri mempelajari pengelolaan sapi perah melalui literatur yang tersedia. Seiring waktu, keberhasilan usaha tersebut menarik minat masyarakat Dusun Singolangu untuk ikut memelihara sapi perah, hingga pada tahun 2015 jumlah sapi perah yang dimiliki masyarakat meningkat secara signifikan. Perkembangan ini kemudian mendorong pemerintah daerah untuk menetapkan Dusun Singolangu sebagai Kampung Susu Lawu melalui program resmi yang dicanangkan sejak tahun 2015.

Melalui program Kampung Susu Lawu (KSL) yang dicanangkan sejak 2015, pemerintah daerah mendorong pemberdayaan peternak sapi perah berbasis komunitas. Kampung Susu Lawu telah dikenal sebagai ikon peternakan rakyat dan wisata edukatif yang berbasis pada ekosistem produksi susu di lereng Gunung Lawu. Dibalik keberhasilan program Kampung Susu Lawu (KSL) masih terdapat banyak tantangan yang

dihadapi oleh peternak seperti kapasitas produksi dan keberlanjutan usaha. Dalam hal ini, Dinas Peternakan sebagai lembaga teknis milik pemerintah daerah punya peran yang sangat penting. Tugas utamanya adalah membina, memfasilitasi, dan meningkatkan kemampuan para peternak, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Bentuk pembinaan yang dilakukan antara lain melalui kegiatan penyuluhan, pelatihan teknis, penyediaan sarana produksi, dan penguatan kelompok peternak.

Beberapa penelitian terdahulu telah banyak mengkaji pemberdayaan peternak sapi perah dari berbagai pendekatan, terutama yang berfokus pada peran koperasi dan peningkatan kapasitas teknis peternak. Misalnya, penelitian oleh Widyanti dan Subqi (2020) menyoroti strategi pemberdayaan yang diterapkan oleh Kelompok Ngudi Luhur II di Kota Salatiga melalui koperasi. Hasilnya menunjukkan bahwa pelatihan teknis, pemasaran kolektif, dan diversifikasi produk susu mampu meningkatkan produksi dan pendapatan peternak. Namun, penelitian ini tidak mengkaji peran pemerintah daerah secara kelembagaan, dan lebih menekankan pada mekanisme internal kelompok tani (Widyanti & Subqi, 2020).

(Sulistyawati, 2023) mengkaji proses pembangunan kapasitas peternak sapi perah di bawah naungan KSU Tandangsari. Penelitian ini memperlihatkan bahwa koperasi berperan dalam membina, menyediakan sarana produksi, dan membantu pemasaran. Meskipun demikian, peran Dinas Peternakan sebagai institusi pemerintah daerah tidak menjadi fokus utama kajian ini. Penelitian oleh (Widyanta, 2020) membahas peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan peternak melalui program-program dasar seperti penyuluhan dan pemberian bantuan bibit. Meskipun relevan, penelitian ini lebih bersifat makro dan tidak mendalami aspek pembangunan kapasitas SDM secara khusus dalam konteks lokal tertentu.

Berdasarkan studi-studi terdahulu, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penelitian mengenai pemberdayaan peternak sapi perah lebih menekankan pada peran koperasi, aspek teknis budidaya, serta strategi pemasaran hasil susu, sementara kajian yang menempatkan Dinas

Peternakan sebagai aktor utama pemberdayaan peternak di tingkat daerah masih sangat terbatas. Selain itu, lokasi penelitian sebelumnya umumnya dilakukan di wilayah sentra peternakan sapi perah yang telah berkembang dan mapan, seperti Malang, Boyolali, dan Mojokerto, sehingga belum banyak menggambarkan dinamika pemberdayaan di wilayah yang sedang berkembang. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan penelitian, khususnya terkait peran dan efektivitas Dinas Peternakan dalam meningkatkan kapasitas peternak sapi perah pada kawasan berbasis komunitas dan wisata edukatif, seperti Kampung Susu Lawu di Kabupaten Magetan.

Efektivitas program pemberdayaan hingga saat ini yang dijalankan oleh Dinas Peternakan di Kampung Susu Lawu, baik dalam bentuk pelatihan, pendampingan teknis, maupun penguatan kelembagaan peternak, belum banyak dikaji secara ilmiah pada tingkat lokal. Oleh karena itu, penelitian ini secara spesifik berfokus pada bagaimana Dinas Peternakan Kabupaten Magetan menjalankan perannya dalam pemberdayaan peternak sapi perah untuk meningkatkan kapasitas peternak di lingkungan Kampung Susu Lawu. Penelitian ini penting dilakukan karena tidak hanya menganalisis peran, strategi, dan bentuk intervensi pemerintah daerah, tetapi juga menggali persepsi peternak terhadap program pemberdayaan yang dilaksanakan, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi perumusan kebijakan yang lebih partisipatif dan berkelanjutan, serta memperkaya kajian teoretis mengenai pemberdayaan peternak melalui peran institusi pemerintah daerah.

## **B. Rumusan Masalah**

Fokus permasalahan yang akan diangkat oleh peneliti kali ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana partisipasi peternak sapi perah dalam program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan Kabupaten Magetan di Kampung Susu Lawu?
2. Bagaimana peran Dinas Peternakan Kabupaten Magetan dalam

meningkatkan kapasitas dan kemandirian peternak sapi perah di Kampung Susu Lawu?

3. Bagaimana pengakuan Dinas Peternakan Kabupaten Magetan terhadap nilai dan potensi lokal dalam proses pemberdayaan peternak sapi perah di Kampung Susu Lawu?
4. Bagaimana penerapan prinsip keadilan sosial dan inklusivitas dalam pelaksanaan program pemberdayaan peternak sapi perah oleh Dinas Peternakan Kabupaten Magetan?
5. Bagaimana hubungan kemitraan antara Dinas Peternakan Kabupaten Magetan dan peternak sapi perah dalam proses pemberdayaan di Kampung Susu Lawu?
6. Bagaimana keberlanjutan program pemberdayaan peternak sapi perah yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan Kabupaten Magetan di Kampung Susu Lawu?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang sudah dijelaskan diatas peneilitian ini memiliki tujuan untuk :

1. Untuk mengetahui tingkat partisipasi peternak sapi perah dalam program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan Kabupaten Magetan di Kampung Susu Lawu.
2. Untuk menganalisis peran Dinas Peternakan Kabupaten Magetan dalam meningkatkan kapasitas dan kemandirian peternak sapi perah di Kampung Susu Lawu.
3. Untuk mengetahui bentuk pengakuan Dinas Peternakan Kabupaten Magetan terhadap nilai dan potensi lokal dalam pemberdayaan peternak sapi perah di Kampung Susu Lawu.
4. Untuk menganalisis penerapan prinsip keadilan sosial dan inklusivitas dalam pelaksanaan program pemberdayaan peternak sapi perah oleh Dinas Peternakan Kabupaten Magetan.

5. Untuk menganalisis hubungan kemitraan antara Dinas Peternakan Kabupaten Magetan dan peternak sapi perah dalam proses pemberdayaan di Kampung Susu Lawu.
6. Untuk mengetahui keberlanjutan program pemberdayaan peternak sapi perah yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan Kabupaten Magetan di Kampung Susu Lawu.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat untuk semua orang yang membaca antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian dalam bidang Ilmu Pengetahuan khususnya dalam bidang Ilmu Pemerintahan, khususnya terkait peran dan fungsi lembaga pemerintah daerah dalam menjalankan tugas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Hasil penelitian ini juga dapat memperkaya literatur mengenai implementasi kebijakan daerah dalam sektor peternakan berbasis komunitas, serta bagaimana dinamika hubungan antara pemerintah dan warga dalam konteks pembangunan lokal.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan bagi Dinas Peternakan Kabupaten Magetan dalam merancang dan mengevaluasi program pemberdayaan peternak agar lebih partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan. Hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi masukan yang berguna bagi peternak sapi perah di Kampung Susu Lawu untuk meningkatkan kapasitas usaha dan kemandirian melalui sinergi dengan lembaga pemerintah. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah daerah secara lebih luas untuk mengembangkan kebijakan pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal, khususnya di sektor peternakan rakyat yang selama ini kurang mendapat perhatian secara kelembagaan.

## **E. Penegasan Istilah**

### **1. Peran**

Peran adalah fungsi atau tanggung jawab yang dijalankan oleh individu, kelompok, atau institusi dalam suatu sistem sosial atau organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Peran mencerminkan bagaimana seseorang atau suatu pihak bertindak dan berkontribusi dalam konteks sosial maupun organisasi, termasuk dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban yang telah ditetapkan. Dalam konteks pemberdayaan peternak, peran seringkali berkaitan dengan bagaimana pemerintah, dinas terkait, dan masyarakat berinteraksi untuk mencapai tujuan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan peternak. Sesuai dengan (Regine Andara Saraswati Putri, 2018) peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan peternak sapi perah sangat penting sebagai fasilitator, motivator, dan pengarah agar peternak dapat mengembangkan usahanya secara mandiri dan berkelanjutan. Peran ini meliputi penyuluhan, pemberian bantuan, serta pengawasan yang berkelanjutan agar tujuan pembangunan dapat tercapai secara efektif.

### **2. Dinas Peternakan**

Dinas Peternakan merupakan instansi pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok mengelola dan mengembangkan sektor peternakan di wilayahnya. Fungsi utama dinas ini meliputi pemberdayaan peternak, pengendalian kesehatan hewan, penyuluhan teknis, serta pengembangan sumber daya peternakan agar dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat peternak. Dinas Peternakan menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang peternakan dan menjadi penghubung antara pemerintah pusat dan peternak di lapangan.

Menurut (Beni Saputra & Rika Widianita, 2023) peran dinas peternakan sangat strategis dalam memberikan pelatihan, bantuan teknis, serta memfasilitasi akses permodalan dan pemasaran bagi peternak sapi perah. Dengan dukungan dinas peternakan yang optimal, peternak dapat meningkatkan kapasitas dan produktivitas usahanya sehingga berdampak positif pada kesejahteraan mereka.



### 3. Kapasitas

Kapasitas merujuk pada kemampuan atau potensi yang dimiliki oleh individu, kelompok, atau organisasi untuk menjalankan fungsi, tugas, atau aktivitas tertentu secara efektif dan efisien. Kapasitas mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, serta sumber daya yang dapat dikembangkan untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks pemberdayaan, kapasitas menjadi fokus utama agar subjek pembangunan dapat mandiri dan berdaya dalam mengelola sumber daya dan menghadapi tantangan. Menurut Eade (1997), pembangunan kapasitas (*capacity building*) adalah proses berkelanjutan yang bertujuan memperkuat kemampuan manusia dan organisasi agar dapat menentukan prioritas dan bertindak sesuai kepentingan mereka sendiri. Proses ini melibatkan pengembangan individu, penguatan organisasi, dan pembentukan jaringan yang mendukung keberlanjutan pembangunan.

### 4. Peternak Sapi Perah

Peternak sapi perah adalah individu atau kelompok masyarakat yang menjalankan usaha pemeliharaan sapi perah dengan tujuan utama menghasilkan susu sebagai produk utama. Peternak ini bertanggung jawab atas manajemen kesehatan ternak, pemberian pakan, serta pengelolaan hasil produksi susu untuk dikonsumsi atau dijual. Peningkatan kapasitas peternak melalui penyuluhan dan pelatihan sangat penting agar mereka mampu menerapkan sistem peternakan berkelanjutan dan meningkatkan produktivitas usaha. Peran penyuluh peternakan sangat vital dalam memberikan pengetahuan teknis dan motivasi kepada peternak agar mampu beradaptasi dengan tantangan yang ada (Nurlina et al., 2025).

### 5. Kampung Susu Lawu (KSL)

Kampung Susu Lawu (KSL) adalah sebuah komunitas atau wilayah yang dikembangkan sebagai sentra peternakan sapi perah dengan fokus pada peningkatan produksi susu dan pemberdayaan peternak secara terpadu dan berkelanjutan. KSL mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam pengembangan usaha sapi perah sehingga menjadi model pengembangan peternakan yang efektif dan ramah lingkungan. KSL juga



berperan sebagai pusat pelatihan, inovasi, dan jejaring pemasaran yang mendukung peningkatan kapasitas dan kesejahteraan peternak di wilayah tersebut (Muniroh et al., 2020).

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Untuk memperkuat penelitian, peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu sebagai referensi. Penelitian oleh Okta Widyanti dan Imam Subqi (2025) membahas strategi pemberdayaan yang diterapkan oleh Kelompok Ngudi Luhur II di Kelurahan Randuacir, Kota Salatiga, dalam meningkatkan perekonomian peternak sapi perah. Menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi, penelitian ini menemukan bahwa pemberdayaan dilakukan melalui pelatihan teknis, sistem koperasi, diversifikasi produk olahan susu, pemasaran kolektif, dan penggunaan teknologi modern. Hasilnya menunjukkan peningkatan produksi susu dari 10 menjadi 15 liter per hari per ekor, serta kenaikan pendapatan anggota hingga 150%. Strategi yang diterapkan terbukti efektif meningkatkan kesejahteraan peternak, meskipun tantangan seperti fluktuasi harga pakan dan kebutuhan modal tetap menjadi hambatan yang perlu diatasi melalui dukungan pemerintah dan swasta (Widyanti & Subqi, 2020).

Penelitian oleh Hermawan, Marina Sulistyati, Lilis Nurlina, dan Aris Riswara (2022) berjudul *“Upaya Pembangunan Kapasitas Peternak Sapi Perah sebagai Anggota Koperasi untuk Mencapai Skala Usaha yang Layak”* bertujuan mengkaji proses pembangunan kapasitas peternak sapi perah dan peran koperasi KSU Tandangsari dalam mendorong peningkatan skala usaha peternak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas peternak dibangun melalui kreativitas, adaptabilitas, motivasi, dan perbaikan usaha berkelanjutan, seperti penggunaan inovasi pakan, pemanfaatan biogas, serta kemampuan manajerial dan komunikasi. Koperasi berperan aktif dalam pembinaan teknis, penyediaan modal, sarana produksi, dan pemasaran susu. Penelitian ini menegaskan pentingnya dukungan kelembagaan dalam membangun kapasitas individu agar peternak mampu mencapai skala usaha sapi perah yang layak secara ekonomi

dan berkelanjutan (Lisnanti et al., 2023).

Penelitian oleh Bayu Krisna Ardiansyah dan Ainun Ma'rifah (2020) berjudul *"Pemberdayaan Peternak Sapi Perah di Desa Galengdowo Kecamatan Wonosalam oleh Dinas Peternakan Kabupaten Jombang"* bertujuan untuk mengkaji upaya pemberdayaan yang dilakukan pemerintah terhadap peternak serta hambatan yang dihadapi dan cara mengatasinya. Menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif, data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap 13 informan dari unsur dinas, desa, dan peternak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan dilaksanakan melalui empat aspek utama: bina manusia (pelatihan teknis dan penguatan jejaring), bina usaha (pengadaan pakan, peralatan, dan akses pasar), bina lingkungan (pengelolaan limbah dan kesadaran kesehatan), dan bina kelembagaan (pembentukan kelompok dan kemitraan). Kendala yang ditemukan antara lain keterbatasan penyuluh lapangan, pelatihan yang belum merata, mahal nya sarana produksi, dan rendahnya kesadaran pelaporan. Pemerintah daerah merespons hambatan tersebut melalui strategi pelatihan bergilir, kolaborasi antarkecamatan, pameran produk, hingga pembentukan media komunikasi digital antar kelompok. Penelitian ini menunjukkan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas dan kemandirian peternak melalui pendekatan partisipatif dan multisector (Ma et al., n.d.).

Penelitian oleh Seftian Nuwafwahyudin, Retno Widyani, Fitri Dian Perwitasari, dan Mus Nilamcaya (2023) berjudul *"Manajemen Pemeliharaan Sapi Perah Laktasi di Koperasi Laras Ati"* bertujuan mengkaji tata kelola pemeliharaan sapi perah laktasi yang diterapkan di Koperasi Laras Ati, Kabupaten Kuningan. Penelitian ini menggunakan metode observasi dan wawancara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen pemeliharaan masih kurang optimal, terutama dalam aspek pemberian pakan yang belum disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sapi, proses pemerahan yang tidak memenuhi standar kebersihan seperti tanpa penggunaan desinfektan (dipping), serta pengolahan limbah yang belum maksimal. Selain itu, sistem kandang semi terbuka, manajemen pakan, air minum, sanitasi, dan

kesehatan ternak seperti vaksinasi dan pengobatan mastitis, cacingan, dan kembung telah dijelaskan secara detail. Peneliti merekomendasikan adanya peningkatan kapasitas SDM, perbaikan manajemen pakan dan pemerahan, serta pengolahan limbah menjadi kompos atau biogas sebagai potensi tambahan pendapatan koperasi. (Nuwafwahyudin et al., 2024).

Penelitian dalam konteks hukum dan perlindungan terhadap peternak sapi perah, Betharia Hasibuan (2020) melalui penelitiannya yang berjudul *“Perlindungan Hukum terhadap Peternak Sapi Perah dikaitkan dengan Keberadaan Asosiasi Peternak dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan”* menyoroti pentingnya regulasi dan asosiasi sebagai pilar kesejahteraan peternak. Menggunakan pendekatan studi kepustakaan (library research), penelitian ini menegaskan bahwa peternak sapi perah sebagai pelaku ekonomi rakyat sering kali tidak memiliki kekuatan tawar dalam menghadapi kebijakan pemerintah maupun pelaku industri. Asosiasi peternak, dalam hal ini, dianggap sebagai sarana logis untuk memperjuangkan hak-hak kolektif serta menjadi perpanjangan tangan dalam pelaksanaan kebijakan, perlindungan hukum, dan peningkatan kesejahteraan. Penelitian ini juga menekankan peran negara dalam menciptakan regulasi yang melindungi peternak melalui kebijakan yang berbasis keadilan sosial dan ekonomi kerakyatan. Dalam kerangka tersebut, perlindungan hukum dipahami tidak hanya sebagai upaya represif, tetapi juga preventif melalui penguatan kelembagaan, akses terhadap sumber daya, dan pembinaan yang adil. Secara umum, tulisan ini menempatkan asosiasi sebagai aktor penting dalam memperjuangkan kesejahteraan peternak dan mendorong pembangunan peternakan yang berorientasi pada keadilan dan kemandirian (Hasibuan et al., 2016).

Penelitian yang dikemukakan oleh Yusmichad Yusdja dan I Wayan Rusastra (2020) dalam artikel berjudul *“Industri Agribisnis Sapi Perah Nasional: Menantang Masa Depan”*. Artikel ini menganalisis berbagai tantangan struktural dan kelembagaan dalam pengembangan agribisnis sapi perah di Indonesia. Penulis mengungkapkan bahwa dominasi pasar oleh industri pengolahan susu (IPS), ketergantungan koperasi pada IPS, serta lemahnya kapasitas peternak rakyat menjadi faktor utama yang menghambat efisiensi

industri. Artikel ini juga menyoroti rendahnya skala usaha peternak rakyat, kurangnya akses terhadap teknologi, dan lemahnya posisi tawar peternak dalam rantai pasok. Sebagai solusi, penulis merekomendasikan reformasi kelembagaan koperasi agar lebih berorientasi pada pelayanan, pengembangan usaha skala menengah, serta promosi konsumsi susu segar sebagai strategi peningkatan daya saing di tengah pasar global yang semakin terbuka. Artikel ini memberikan wawasan penting bagi upaya perbaikan sistem agribisnis sapi perah secara nasional, termasuk dalam aspek kebijakan, kelembagaan, dan kemandirian peternak (Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), 2020).

Penelitian oleh Beni Saputra dan Rika Widianita (2023) berjudul *"Peran Pemerintah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Sektor Peternakan"* mengkaji peran pemerintah dalam membantu peternak melalui program kesehatan hewan, penyuluhan, pemberian bibit, dan pengembangan pasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah cukup aktif, namun masih terkendala rendahnya partisipasi peternak dan minimnya pengetahuan teknis yang dimiliki masyarakat. Fokus penelitian ini lebih menekankan pada aspek kesejahteraan umum, sehingga belum secara spesifik membahas peningkatan kapasitas peternak berbasis pembangunan kapasitas atau *capacity building*, seperti yang menjadi fokus dalam penelitian ini (Beni Saputra & Rika Widianita, 2023).

Penelitian oleh Fahma Jatipermata dan Agustina Multi Purnomo (2022) yang berjudul *"Peran Komunikasi Penyuluh dalam Pemberdayaan Peternak Sapi Perah pada Koperasi Produksi Susu Bogor"* bertujuan untuk mengkaji sejauh mana peran komunikasi penyuluh dalam proses pemberdayaan peternak sapi perah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran komunikasi penyuluh yang dijalankan oleh petugas paramedis belum optimal dalam membangun proses pemberdayaan. Komunikasi antara penyuluh dan peternak cenderung berlangsung satu arah dan terbatas pada pelayanan kesehatan ternak. Prinsip-prinsip komunikasi pemberdayaan seperti *dialogue*, *voice*, *liberating pedagogy*, dan *action-reflection-action* belum sepenuhnya diterapkan. Bahkan, proses aksi-refleksi-aksi tidak ditemukan

dalam kegiatan penyuluhan yang ada. Temuan ini mengindikasikan bahwa hubungan komunikasi yang terbina belum mendukung terciptanya proses pemberdayaan yang sejati dan berkelanjutan. Penelitian ini relevan sebagai pembandingan, namun berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan karena lebih menekankan pada aspek komunikasi penyuluh, bukan pada peran institusi pemerintah daerah secara kelembagaan dalam peningkatan kapasitas peternak sapi perah (Jatipermata & Purnomo, 2022).

Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) untuk menelaah peranan kelembagaan peternakan sapi perah, khususnya dalam konteks Kelompok Usaha Bersama (KUB) Tirtasari Kresna Gemilang di Kabupaten Malang. Hasil kajian terhadap 12 jurnal nasional terindeks Sinta menunjukkan bahwa kelembagaan peternakan memiliki peran strategis dalam meminimalkan risiko usaha, mendukung pengembangan usaha ternak, serta memperluas akses peternak terhadap sumber daya finansial, teknologi, sosial, dan fisik. Selain itu, kelembagaan juga berfungsi sebagai wadah bagi penguatan kapasitas sumber daya manusia peternak, pelayanan kesehatan ternak, pemasaran susu, serta sistem pembagian pakan dan bonus yang terstruktur. Penelitian ini menegaskan pentingnya peran kelembagaan sebagai pilar keberlanjutan usaha peternakan skala rumah tangga. Meski fokus pada lembaga swadaya peternak, studi ini memperkaya pemahaman tentang bagaimana struktur kelembagaan yang kuat dapat mendukung pemberdayaan, meskipun tidak membahas secara spesifik peran pemerintah daerah seperti yang menjadi fokus penelitian ini (Java, 2025).

Penelitian yang dilakukan oleh (Bayu Krisna, 2021) membahas pemberdayaan peternak sapi perah di Desa Galengdowo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang oleh Dinas Peternakan Kabupaten Jombang dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan teori pemberdayaan Totok Mardikanto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan peternak sapi perah dilaksanakan melalui empat aspek utama, yaitu bina manusia, bina usaha, bina lingkungan, dan bina kelembagaan. Pada aspek bina manusia, pemberdayaan dilakukan melalui pelatihan dan peningkatan kapasitas peternak, meskipun masih terbatas oleh sistem perwakilan peserta dan jumlah penyuluh lapangan. Bina usaha diwujudkan melalui penyediaan pakan, sarana prasarana produksi, pengolahan hasil susu, serta perlindungan usaha

ternak, namun masih menghadapi kendala seperti kenaikan harga pakan dan keterbatasan fasilitas. Bina lingkungan dilakukan melalui pemanfaatan limbah ternak menjadi biogas dan kompos, sedangkan bina kelembagaan diwujudkan melalui pembentukan dan penguatan kelompok ternak serta kemitraan dengan berbagai pihak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran Dinas Peternakan cukup signifikan dalam pemberdayaan peternak sapi perah, meskipun masih terdapat berbagai hambatan yang memerlukan perhatian lebih lanjut agar pemberdayaan dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas pemberdayaan peternak sapi perah, baik melalui koperasi, kemitraan, maupun strategi kelembagaan, sebagian besar fokus kajian tersebut masih terbatas pada peningkatan kapasitas dari sisi teknis manajerial atau pola hubungan ekonomi antara peternak dan lembaga mitra seperti koperasi atau IPS. Sebagai contoh, beberapa studi lebih menekankan efektivitas kemitraan koperasi (Kuncoro et al., 2022), performa kelembagaan dan risiko usaha (Amam & Harsita, 2020), serta aspek manajemen pemeliharaan sapi (Nuwafwahyudin et al., 2023). Namun, sangat sedikit penelitian yang secara spesifik mengulas peran aktif institusi pemerintah daerah, khususnya Dinas Peternakan, dalam upaya sistematis meningkatkan kapasitas peternak berbasis wilayah tertentu. Selain itu, lokasi penelitian pada umumnya berada di wilayah sentra peternakan seperti Malang, Boyolali, atau Mojokerto, yang memiliki struktur dan fasilitas kelembagaan relatif lebih mapan. Hal ini menyisakan kesenjangan penelitian (research gap), terutama pada wilayah yang baru berkembang sebagai sentra peternakan, seperti Kampung Susu Lawu di Kabupaten Magetan. Penelitian ini mencoba mengisi kekosongan tersebut dengan menggali secara mendalam bagaimana peran Dinas Peternakan Kabupaten Magetan dalam meningkatkan kapasitas peternak sapi perah, baik dari aspek pelatihan, pendampingan, akses pasar, maupun keberlanjutan program. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melengkapi kajian terdahulu, tetapi juga memberikan kontribusi baru dari sisi aktor kebijakan publik dan dinamika lokal yang belum banyak disorot.

## G. Landasan Teori

### 1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah sebagai upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah upaya untuk menguatkan kelembagaan masyarakat agar mereka memiliki kemampuan dalam mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan. Ada banyak pengertian pemberdayaan masyarakat menurut para ahli, antara lain sebagai berikut:

- a. Britha, Mikkelsen (2011). pemberdayaan masyarakat adalah sekumpulan praktek dan kegiatan yang diungkapkan dalam bentuk simbol simbol. Simbol simbol tersebut kemudian mengomunikasikan kekuatan yang tangguh untuk untuk mengubah hal hal yang terkandung dalam diri kita (inner space), orang orang lain yang dianggap penting serta masyarakat kita.
- b. Ife, Jim & Tesoriero, Frank (2016), definisi pemberdayaan masyarakat ialah memberikan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan kepada warga untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan masa depan mereka sendiri dan berpartisipasi pada upaya mempengaruhi kehidupan dari kelompoknya.
- c. Gitosaputro, S & Ranga K.K (2015), pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan yang membuat 4 masyarakat berinisiatif untuk memulai kegiatan sosial dalam memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri.
- d. Fahrudin, Adi (2012), menjelaskan pemberdayaan masyarakat diartikan sebagai upaya untuk membangun potensi dengan memberikan motivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta upaya untuk mengembangkannya.
- e. Mardikanto dkk (2014), menjelaskan pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memberikan daya (empowerment) atau penguatan (strengthening) kepada masyarakat. Pemberdayaan masyarakat juga diartikan sebagai kemampuan individu yang bersenyawa dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang



bersangkutan sehingga bertujuan untuk menemukan alternatif-alternatif baru dalam pembangunan masyarakat.

## 2. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan adalah kata benda, sedangkan actionnya adalah kata kerja yaitu memberdayakan. Memberdayakan masyarakat adalah usaha meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sebelumnya tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan merupakan upaya yang dilakukan untuk memberikan daya (empowerment) atau kekuatan (strengthening) kepada masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dapat dikatakan sebagai usaha memandirikan, mengembangkan, menswadayakan, dan memperkuat posisi tawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan melalui pengalihan pengambilan keputusan kepada masyarakat agar mereka terbiasa dan mampu bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang dipilihnya. ini berarti bahwa pemberdayaan masyarakat adalah usaha memandirikan dan memampukan dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran terhadap potensi yang dimilikinya untuk lebih berdaya guna dan berhasil guna. Dalam konteks implemementasi, konsep pemberdayaan sering pula dipersamakan artinya dengan pengembangan komunitas/masyarakat (community development) atau dikalangan organisasi masyarakat sipil ataupun NGO sering menggunakan terminologi CD dalam memberikan pendampingan atau penguatan masyarakat dalam berbagai kegiatan, baik yang berhubungan proses pengembangan masyarakat yang bertujuan memampukan masyarakat memenuhi kebutuhan sendiri, serta memutuskan apa yang terbaik bagi dirinya.

Dalam proses pemberdayaan, bukan hanya membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian karena pada dasarnya setiap apa yang dimiliki harus dihasilkan atas jerih payahnya sendiri, yang hasilnya dapat dipertukarkan dengan pihak lain. Menurut Moelijarto bahwa setiap manusia dan masyarakat memiliki potensi yang

dapat dikembangkan. Sehingga pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun potensi, memberikan motivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Pemberdayaan pada dasarnya berusaha untuk membangun potensi yang ada pada diri seseorang dengan memberikan motivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya mengembangkan potensi yang ada sebagai proses belajar mengajar yang merupakan usaha yang terencana dan sistematis. serta pemberdayaan dapat dilihat dari setiap masyarakat yang memiliki potensi untuk dikembangkan.

### 3. Teori Pemberdayaan masyarakat menurut Jim Ife

Teori pemberdayaan masyarakat yang dikembangkan oleh Jim Ife berasal dari konsep dasar *community development* (pengembangan masyarakat) yang berakar pada pendekatan partisipatif, keadilan sosial, dan keberlanjutan. Jim Ife menekankan bahwa pemberdayaan tidak hanya soal memberikan bantuan atau intervensi teknis, tetapi merupakan proses sosial yang memungkinkan masyarakat mengakses sumber daya, membuat keputusan sendiri, dan mengelola perubahan secara kolektif demi meningkatkan kesejahteraan mereka.

Menurut Jim Ife & Frank Tesoriero (2016), pemberdayaan masyarakat adalah proses memberikan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan kepada masyarakat agar mereka memiliki kemampuan menentukan masa depan sendiri serta dapat berpartisipasi dalam memengaruhi kehidupan kelompok atau komunitasnya. Konsep ini lahir sebagai kritik terhadap pendekatan pembangunan yang bersifat top-down dan terlalu terpusat pada pemerintah atau lembaga donor, tanpa memperhatikan kapasitas dan konteks lokal masyarakat.

Teori ini kemudian diimplementasikan dalam berbagai program pengembangan masyarakat, khususnya oleh organisasi masyarakat sipil (OMS), LSM, dan pemerintah daerah yang berorientasi pada pendekatan berbasis komunitas. Misalnya, dalam proyek penguatan desa, pemberdayaan petani atau peternak, dan program-program berbasis partisipasi warga. Dalam konteks ini, pemerintah atau pendamping tidak

menjadi aktor dominan, melainkan fasilitator yang membantu masyarakat mengembangkan kapasitas mereka sendiri.

Jim Ife membagi pendekatan pemberdayaan menjadi beberapa prinsip utama, yaitu:

- a. Prinsip partisipasi aktif, di mana masyarakat harus dilibatkan secara langsung dan bermakna dalam setiap proses pembangunan.
- b. Prinsip pengakuan terhadap nilai-nilai lokal dan kearifan komunitas, agar pemberdayaan tidak mengabaikan identitas dan potensi budaya yang ada.
- c. Prinsip keadilan sosial, yaitu memastikan kelompok rentan dan terpinggirkan mendapatkan tempat dan perlakuan adil dalam proses pemberdayaan.
- d. Prinsip keberlanjutan ekologis, yaitu pembangunan yang tidak hanya berorientasi ekonomi, tetapi juga memperhatikan keseimbangan lingkungan.
- e. Prinsip transformasi sosial, yang bertujuan mengubah struktur sosial yang tidak adil dan membangun masyarakat yang lebih berdaya secara kolektif.

#### 4. Relevansi Teori dengan Penelitian

Teori pemberdayaan masyarakat yang dikembangkan oleh Jim Ife sangat relevan digunakan dalam penelitian ini karena menekankan pada pentingnya pendekatan partisipatif, penguatan kapasitas lokal, dan keadilan sosial dalam proses pembangunan masyarakat. Fokus penelitian ini adalah menganalisis bagaimana Dinas Peternakan Kabupaten Magetan memberdayakan peternak sapi perah di Kampung Susu Lawu, sehingga teori Jim Ife dapat menjadi alat analisis untuk menilai apakah proses pemberdayaan tersebut benar-benar menempatkan peternak sebagai subjek pembangunan, atau masih bersifat top-down. Prinsip-prinsip dasar dalam teori Jim Ife seperti partisipasi aktif, pengakuan terhadap nilai-nilai lokal, dan hubungan kemitraan yang sejajar antara pemerintah dan masyarakat,

memberikan kerangka untuk memahami kualitas interaksi antara Dinas Peternakan dan peternak dalam pelaksanaan program. Selain itu, teori ini juga memungkinkan peneliti mengevaluasi sejauh mana program-program pemberdayaan yang dilakukan dinas bersifat inklusif, berkelanjutan, dan mampu mendorong transformasi sosial di kalangan peternak. Dengan demikian, teori Jim Ife bukan hanya relevan secara konseptual, tetapi juga praktis dalam menjelaskan dinamika dan efektivitas program pemberdayaan yang terjadi di lapangan.

Prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat yang dikemukakan oleh Jim Ife, seperti partisipasi aktif, pengakuan terhadap nilai lokal, keadilan sosial, kemitraan sejajar, keberlanjutan, dan transformasi sosial, menjadi dasar dalam membangun kerangka analisis pada penelitian ini. Prinsip-prinsip tersebut akan digunakan sebagai acuan dalam mengkaji sejauh mana pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Peternakan terhadap peternak sapi perah di Kampung Susu Lawu berjalan secara partisipatif dan berkelanjutan. Indikator dari masing-masing prinsip tersebut telah dijabarkan secara operasional pada bagian metode penelitian dan menjadi dasar dalam menyusun instrumen pengumpulan data.

#### **H. Definisi Operasional**

Pemberdayaan masyarakat menurut Jim Ife merupakan suatu proses sosial yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas individu dan komunitas agar mereka mampu mengambil keputusan, mengelola sumber daya, serta menentukan arah masa depan komunitasnya secara mandiri, adil, dan berkelanjutan. Dalam konteks penelitian ini, pemberdayaan peternak sapi perah dimaknai sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Peternakan Kabupaten Magetan untuk membina, mendampingi, dan meningkatkan kemampuan peternak baik dari sisi pengetahuan teknis, organisasi, maupun akses terhadap sumber daya dan pasar sehingga mereka menjadi aktor utama dalam pengelolaan usaha sapi perah di Kampung Susu Lawu. Berikut adalah indikator teori Jim Ife yang dijadikan dasar operasionalisasi konsep dalam penelitian :

#### 1. Partisipasi Aktif Masyarakat

Keterlibatan peternak dalam penyusunan program, pelaksanaan pelatihan, evaluasi, serta pengambilan keputusan kelompok, untuk menganalisis apakah peternak hanya menjadi penerima bantuan atau dilibatkan aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan program yang dilakukan oleh Dinas Peternakan.

#### 2. Penguatan Kapasitas Dan Kemandirian

Peningkatan pengetahuan, keterampilan teknis (manajemen peternakan), manajemen kelompok, dan usaha mandiri. Untuk menilai sejauh mana program dinas berkontribusi pada peningkatan kapasitas peternak—bukan hanya secara teknis, tetapi juga dalam kemampuan mengelola usaha secara berkelanjutan.

#### 3. Pengakuan terhadap Nilai dan Potensi Lokal

Penggunaan pendekatan yang relevan dengan budaya lokal, dukungan terhadap kelembagaan lokal seperti koperasi, serta pelestarian praktik lokal peternakan, untuk Menganalisis apakah dinas menghargai dan memperkuat nilai-nilai lokal seperti gotong royong, kelembagaan komunitas, serta identitas peternak setempat

#### 4. Keadilan Sosial Atau Inklusivitas

Pemerataan akses terhadap pelatihan dan bantuan, perhatian terhadap peternak kecil atau perempuan, serta inklusi kelompok rentan. Untuk mengkaji apakah semua peternak, tanpa terkecuali, mendapatkan akses yang adil terhadap program dinas, atau hanya kelompok tertentu saja yang dominan.

#### 5. Hubungan Kemitraan antara Pemerintah dan Masyarakat

Bentuk relasi yang sejajar, komunikasi dua arah, dan adanya mekanisme dialog atau konsultasi. Untuk menilai apakah Dinas Peternakan menjalankan perannya sebagai fasilitator (bukan pelaku tunggal), dan sejauh mana mereka membangun kolaborasi dengan kelompok peternak secara horizontal.

#### 6. Keberlanjutan Sosial

Program yang tidak hanya bersifat jangka pendek, namun berkelanjutan secara sosial dan tidak merusak lingkungan. Untuk menganalisis apakah program yang dijalankan oleh dinas mampu menciptakan dampak jangka panjang bagi kesejahteraan peternak dan keberlanjutan lingkungan di Kampung Susu Lawu.

Dengan menjadikan teori pemberdayaan Jim Ife sebagai landasan, maka penelitian ini mengkaji pemberdayaan peternak sapi perah bukan hanya sebagai pemberian bantuan, tetapi sebagai proses peningkatan kapasitas masyarakat secara partisipatif, adil, dan berkelanjutan. Setiap indikator dalam teori ini digunakan untuk mengukur efektivitas intervensi Dinas Peternakan, serta sejauh mana pendekatan pemberdayaan tersebut benar-benar menempatkan peternak sebagai subjek pembangunan, bukan objek.

## **I. Metodologi Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan Penelitian**

Penelitian adalah proses penyelidikan atau proses penemuan untuk mendapatkan kebenaran dan membuktikan suatu fenomena. Dalam proses penyelidikan tersebut terdapat kegiatan intelektual yang berusaha mengungkap pengetahuan baru, memperbaiki dan menghilangkan kesalahpahaman. Setiap penelitian membutuhkan metode dalam pengambilan data. Metode penelitian sebagai teknik yang digunakan untuk pengumpulan data dan menganalisis data. Penetapan metode penelitian disesuaikan dengan tujuan penelitian. Penelitian yang bersifat hipotesis dilakukan dengan menggunakan penelitian kuantitatif. Penelitian yang bersifat natural, alami dan mendalam menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian yang mengkolaborasi keduanya agar data lebih komprehensif menggunakan penelitian kombinasi. Pemilihan metode penelitian tergantung pada tujuan penelitian yang ditetapkan peneliti (Reg et al., 2019).

Melalui penelitian kualitatif peneliti dapat mengenali subjek, merasakan apa yang dialami subjek dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian kualitatif di dalamnya melibatkan peneliti sehingga akan paham mengenai konteks dengan situasi dan setting fenomena alami sesuai yang sedang

diteliti. Dari setiap fenomena merupakan sesuatu yang unik, berbeda dengan yang lainnya karena berbeda konteksnya. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk memahami kondisi suatu konteks dengan mengarahkan pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi dalam suatu konteks yang alami (natural setting), tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya yang di lapangan studi (Fadli, 2021)

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang sangat tepat untuk menjawab masalah penelitian yang kompleks. Penelitian ini dipandang memiliki kelebihan karena bukan hanya mengejar hasil dari suatu penelitian, melainkan lebih menekankan pada proses penelitian itu sendiri. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan menggunakan pisau analisis untuk menjawab pertanyaan penelitian. Penekanan pada proses dan pencarian makna lebih ditonjolkan sehingga mendorong kemungkinan penemuan teori baru, data lebih lengkap dan komprehensif (Waruwu, 2024).

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di dua lokasi utama, yaitu Kampung Susu Lawu dan Kantor Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan. Kampung Susu Lawu terletak di Kelurahan Sarangan, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Lokasi ini dipilih karena merupakan kawasan pengembangan peternakan sapi perah berbasis komunitas, yang telah dibina oleh Dinas Peternakan melalui berbagai program pelatihan, bantuan, dan kemitraan usaha. Sementara itu, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan menjadi lokasi penting untuk menggali data mengenai kebijakan, program, dan peran kelembagaan dalam mendukung peningkatan kapasitas peternak. Kedua lokasi tersebut dipilih secara purposive karena relevan dengan fokus penelitian mengenai peran pemerintah dalam pemberdayaan peternak sapi perah.

## 3. Subjek dan Informan Penelitian

Subjek penelitian ini adalah Peran Dinas Peternakan Kabupaten Magetan dalam konteks peningkatan kapasitas peternak. Sedangkan informan penelitian ditentukan secara purposive sampling. Teknik



purposive sampling merupakan Teknik penentuan informan berdasarkan pertimbangan tertentu, yang dianggap sesuai dengan topik penelitian, dengan kriteria yang relevan terhadap fokus penelitian. Informan utama meliputi:

- a. Informan dari Dinas Peternakan, yaitu aparatur pemerintah di lingkup Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan yang terlibat langsung dalam program pembinaan peternak di Kampung Susu Lawu. Mereka memiliki informasi terkait kebijakan, pelaksanaan program, serta strategi yang digunakan untuk meningkatkan kapasitas peternak. Informan ini dapat mencakup:

No.	Nama atau Jabatan	Alasan
1.	Kepala bidang	karena memiliki peran dalam merumuskan kebijakan dan strategi pemberdayaan peternak, serta memahami tujuan program secara menyeluruh dari sisi kelembagaan.
2.	Staf teknis	Memiliki informasi teknis dan administratif terkait pelaksanaan program, termasuk pelatihan, penyaluran bantuan, dan kendala operasional yang terjadi di tingkat implementasi.

Tabel 1.1 Informan Dinas Peternakan

- b. Informan dari Kelompok Peternak di Kampung Susu Lawu, yaitu peternak sapi perah yang tergabung dalam kelompok atau komunitas peternak yang menerima program dari dinas. Mereka adalah pihak yang mengalami langsung dampak dari pelatihan, bantuan, atau intervensi dinas, yaitu :

No.	Nama atau Jabatan	Alasan
1.	Ketua Atau Pengurus	Karena memiliki wawasan menyeluruh tentang kegiatan kelompok, keterlibatan

	Kelompok Peternak	dalam koordinasi program dengan Dinas Peternakan, serta mampu menjelaskan proses, kendala, dan capaian program pemberdayaan
2.	Anggota Aktif Kelompok	Karena merasakan langsung dampak dari kegiatan seperti pelatihan, bantuan ternak, atau penyuluhan. Mereka bisa memberikan testimoni faktual mengenai manfaat, tantangan, serta perubahan yang dialami setelah intervensi program.

Tabel 1.2 Informan Dari Kelompok Peternak

- c. Informan Tambahan (Pendukung), merupakan pihak yang mengetahui dinamika pembangunan kapasitas peternak dan dapat memberikan pandangan tambahan. Misalnya:

No.	Nama atau Jabatan	Alasan
1.	Pengurus Koperasi Susu (jika ada)	Karena koperasi sering berperan sebagai mitra dalam pelatihan, distribusi hasil susu, hingga akses ke pasar dan pembiayaan. Pandangan mereka dapat memperkuat analisis mengenai sinergi antara dinas dan lembaga lokal.

Tabel 1.3 Informan Tambahan

- d. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif ini, teknik pengumpulan data dilakukan secara alami dan berorientasi pada makna. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam terhadap fenomena sosial yang diteliti, yaitu peran Dinas Peternakan dalam meningkatkan kapasitas peternak sapi perah di Kampung Susu Lawu. Oleh karena itu, data dikumpulkan melalui beberapa teknik utama berikut:

### 1) Observasi

Observasi dilakukan secara langsung di lapangan untuk melihat praktik-praktik yang dijalankan baik oleh peternak maupun oleh Dinas Peternakan. Peneliti mengamati pelaksanaan program, aktivitas kelompok peternak, penggunaan sarana peternakan, serta interaksi antarpeternak dan antara peternak dengan dinas. Observasi ini bersifat partisipatif terbuka, di mana peneliti tidak hanya menjadi pengamat pasif, tetapi juga berinteraksi dengan subjek untuk memahami konteks secara lebih nyata. Hasil observasi dicatat dalam jurnal lapangan sebagai bagian dari data kualitatif yang dianalisis bersama hasil wawancara.

### 2) Wawancara

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur kepada informan kunci yang dianggap relevan dengan fokus penelitian. Informan tersebut meliputi aparat Dinas Peternakan Kabupaten Magetan, peternak sapi perah yang tergabung dalam kelompok peternak di Kampung Susu Lawu, serta tokoh masyarakat atau mitra yang terlibat dalam program pembinaan. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi mengenai bentuk-bentuk peran yang dijalankan oleh dinas, pengalaman peternak dalam menerima program pembinaan, serta dampak dari intervensi tersebut terhadap peningkatan kapasitas mereka. Pertanyaan disusun berdasarkan indikator dari teori capacity building dan disesuaikan secara fleksibel saat proses wawancara berlangsung.

### 3) Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Dokumen yang dikumpulkan meliputi profil program, laporan kegiatan dinas, data kelompok peternak, dokumentasi visual (seperti foto kegiatan), serta arsip atau surat keputusan terkait program pembinaan. Dokumen ini menjadi bukti tertulis yang penting dalam menelusuri proses

pemberdayaan yang telah dijalankan oleh dinas maupun kelompok peternak.

Dengan menggabungkan ketiga teknik tersebut, peneliti dapat memperoleh data yang saling melengkapi, serta memungkinkan dilakukan triangulasi untuk meningkatkan validitas dan kedalaman analisis terhadap fenomena yang diteliti.

e. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, data dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Analisis data kualitatif adalah proses deskripsi, klasifikasi dan interkoneksi dari fenomena dengan konsep peneliti. Fenomena yang diteliti perlu dijelaskan secara tepat. Peneliti harus mampu menginterpretasikan dan menjelaskan data; karena itu kerangka konseptual perlu dikembangkan dan data diklasifikasikan. Tujuan umum menganalisis data menurut Flick, (2013 : 4) dalam kutipan (Rofiah, 2022) adalah menjelaskan suatu fenomena dalam beberapa atau lebih detail membandingkan beberapa kasus tentang apa yang mereka miliki di umum atau perbedaan di antara mereka kemudian mengembangkan teori tentang fenomena di bawah studi dari analisis bahan empiris. Ketika menganalisis data kualitatif, peneliti berurusan dengan makna dan bukan dengan angka-angka murni.

Analisis Data Kualitatif menurut Moleong dalam (Sofwatillah et al., 2024) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Sedangkan analisis data menurut Patton adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Ia membedakannya dengan penafsiran, yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap hasil analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan di antara dimensi-dimensi uraian. Proses analisis data telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan

berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Analisis menjadi pegangan bagi penelitian selanjutnya sampai jika mungkin, teori yang grounded. Analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data dari pada setelah selesai pengumpulan data. Langkah-langkah dalam menganalisis data :

- 1) Mengumpulkan Data, langkah pertama adalah mengumpulkan data melalui teknik-teknik seperti wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Data ini bersifat deskriptif, berupa narasi, kutipan, catatan lapangan, atau dokumen terkait aktivitas dinas dan peternak.
- 2) Melakukan reduksi Data, data yang terkumpul sering kali sangat banyak dan tidak semuanya relevan. Maka, langkah berikutnya adalah merangkum, menyaring, dan memfokuskan data sesuai dengan tujuan penelitian.
- 3) Menyakina Data , setelah data diringkas langkah selanjutnya adalah menyusun data ke dalam tampilan yang mudah dipahami.
- 4) Menarik Kesimpulan, peneliti mulai menarik makna dari data yang sudah ditampilkan. Kesimpulan ini bersifat sementara dan akan terus dikembangkan sesuai data yang masuk.
- 5) Melakukan Verifikasi, langkah ini penting untuk memastikan bahwa kesimpulan yang ditarik benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Peneliti harus memeriksa kembali data dari berbagai sumber, mengecek konsistensi, dan menggunakan triangulasi (metode, sumber, atau waktu).

f. Keabsahan Data

Keabsahan data menjadi hal penting untuk diperhatikan, karena data merupakan komponen yang sangat penting di dalam penelitian, data inilah yang akan nantinya digunakan sebagai sumber analisis data, dan selanjutnya akan digunakan sebagai dasar dalam penarikan kesimpulan, demikian data yang didapatkan harus memenuhi syarat keabsahan data. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi dalam menjaga keabsahan data pada penelitian kualitatif, salah satu cara untuk mengetahui keabsahan data dapat dilakukan dengan

menggunakan triangulasi (Saadah et al., 2022). Triangulasi menurut (Mekarisce, 2020) merupakan sebuah konsep metodologis pada penelitian kualitatif yang perlu diketahui oleh peneliti kualitatif selanjutnya adalah teknik triangulasi. Tujuan triangulasi adalah untuk meningkatkan kekuatan teoritis, metodologis, maupun interpretatif dari penelitian kualitatif. Triangulasi diartikan juga sebagai kegiatan pengecekan data melalui beragam sumber, teknik, dan waktu.

- 1) Triangulasi Sumber, yaitu membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, seperti aparaturnya Dinas Peternakan, peternak sapi perah, serta tokoh masyarakat atau mitra usaha lainnya. Dengan melibatkan berbagai pihak yang memiliki pandangan berbeda, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih objektif dan menyeluruh.
- 2) Triangulasi Teknik, yaitu mengombinasikan teknik pengumpulan data seperti wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi. Misalnya, data yang diperoleh dari wawancara akan dibandingkan dengan hasil observasi kegiatan peternakan di lapangan dan dokumen resmi dari Dinas Peternakan untuk menguji konsistensinya.
- 3) Triangulasi Waktu, juga dilakukan dengan mengumpulkan data dalam beberapa kesempatan berbeda, untuk melihat apakah informasi yang diberikan informan bersifat konsisten atau berubah tergantung situasi. Hal ini penting untuk melihat keandalan data secara temporal.